Panduan Sukses

Ter-*update* & Terlengkap

7 PAKET TKB TES CPNS 2018/2019

TWK - TIU - TKP

Bedah Materi TWK, TIU, & TKP

Simulasi CAT CPNS Ter-update

Video Tutorial (Full Tip & Trik)

COMPUTER ASSISTED TEST
Sesuai Standar CAT BKN
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Bonus CD
- Software Simulasi CAT
- Pembahasan Materi Penting Tes CPNS
- Tip & Trik Video Tutorial

TIM PSIKOSMART

SELEKSI KOMPETENSI BIDANG (SKB)

1. TENAGA PENDIDIK (PENDIDIKAN DASAR & MENENGAH)

LATIHAN SOAL SKB TENAGA PENDIDIK (PENDIDIKAN DASAR & MENENGAH)

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 merupakan salah satu undang-undang yang penting dalam dunia pendidikan karena mengatur tentang ....
   A. Bantuan Operasional Sekolah
   B. Guru dan Dosen
   C. Pendidikan Karakter
   D. Wajib Belajar
   E. Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional

2. Guru dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatan sebagai guru apabila melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas selama ... berturut-turut.
   A. 1 bulan
   B. 3 bulan
   C. 4 bulan
   D. 6 bulan
   E. 12 bulan

3. Alokasi dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan sedikitnya adalah ... dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan.
   A. 10%
   B. 15%
   C. 20%
   D. 25%
   E. 50%

4. Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan di bawah ini ....
   A. Formal
   B. Informal
   C. Nonformal
   D. Tidak ada jawaban benar
   E. Semua jawaban benar

5. Syarat-syarat untuk memperoleh izin pendirian satuan pendidikan meliputi hal-hal di bawah ini, kecuali ....
   A. Lokasi pendidikan
   B. Isi pendidikan
   C. Sarana dan prasarana pendidikan

D. Pembiayaan pendidikan
E. Tidak ada jawaban benar

6. Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) ditiadakan pada tahun 2013 karena membatasi akses hak warga negara untuk mengenyam kualitas pendidikan yang baik. Lembaga negara yang mengeluarkan keputusan peniadaan RSBI ini adalah ....
   A. Majelis Permusyawaratan Rakyat
   B. Dewan Perwakilan Rakyat
   C. Mahkamah Konstitusi
   D. Presiden
   E. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

7. Di bawah ini merupakan jenis-jenis pendidikan informal yang ada di Indonesia, kecuali ....
   A. Taman Pendidikan Alquran
   B. Pascasarjana
   C. Sekolah Minggu
   D. Kursus musik
   E. Bimbingan belajar

8. Besar biaya satuan bantuan operasional sekolah yang diterima oleh sekolah dihitung berdasarkan jumlah siswa. Dalam hal ini, ketentuan biaya yang diterima untuk Sekolah Menengah Pertama adalah ....
   A. Rp710.000/siswa per tahun
   B. Rp580.000/siswa per tahun
   C. Rp670.000/siswa per tahun
   D. Rp650.000/siswa per tahun
   E. Rp740.000/siswa per tahun

9. Pendidikan anak usia dini merupakan pendidikan yang diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar. Berkaitan dengan hal tersebut, pendidikan anak usia dini yang dapat dikategorikan dalam jalur pendidikan formal adalah ....
   A. TK dan RA
   B. TK dan Keluarga
   C. KB dan TPA
   D. TPA dan RA
   E. TK dan TPA

10. Pendidikan pasraman merupakan salah satu bagian dari pendidikan nasional, tepatnya sebagai bentuk dari ....
    A. Pendidikan Anak Usia Dini
    B. Pendidikan Muatan Lokal
    C. Pendidikan Informal
    D. Pendidikan Kedinasan
    E. Pendidikan Keagamaan

11. Mata pelajaran yang wajib diberikan oleh lembaga pendidikan asing pada tingkat pendidikan dasar dan menengah bagi peserta didik Warga Negara Indonesia adalah ....
    A. Agama dan olahraga
    B. Agama dan bahasa Indonesia
    C. Kewarganegaraan dan bahasa Indonesia

D. Bahasa Indonesia dan bahasa Inggris
E. Agama dan kewarganegaraan

12. Organisasi profesi guru mempunyai kewenangan-kewenangan di bawah ini, kecuali ....
A. Menetapkan dan menegakkan kode etik guru
B. Memberikan perlindungan profesi guru.
C. Memajukan pendidikan nasional.
D. Memberikan bantuan hukum kepada guru.
E. Mengupayakan peningkatan kesejahteraan guru.

13. Dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi, akuntabilitas, jaminan mutu, dan evaluasi yang transparan merupakan pengelolaan pendidikan pada satuan ....
A. Pendidikan nonformal
B. Pendidikan anak usia dini
C. Pendidikan dasar
D. Pendidikan menengah
E. Pendidikan tinggi

14. Pendidikan karakter bangsa melalui PAUDNI diharapkan dapat mencapai sasaran utama pada tahap ketiga yang berlangsung pada tahun ....
A. 2010 – 2014
B. 2012 – 2015
C. 2015 – 2019
D. 2020 – 2024
E. 2022 – 2026

15. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dapat digunakan untuk membiayai komponen-komponen yang tercantum di bawah ini, kecuali ....
A. Pembiayaan transportasi untuk siswa miskin yang mengalami masalah biaya transportasi ke sekolah.
B. Pembiayaan ulangan umum dan ujian sekolah.
C. Pembiayaan transportasi untuk guru yang mengalami masalah biaya transportasi ke sekolah.
D. Pembelian atau penggandaan buku teks pelajaran.
E. Pembelian bahan-bahan habis pakai.

16. Penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah untuk sekolah yang masuk dalam kategori wilayah terpencil dilaksanakan ... sekali.
A. 1 bulan
B. 3 bulan
C. 4 bulan
D. 6 bulan
E. 12 bulan

17. Lulusan sekolah yang berkualitas menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional akan memiliki ... indikator makro.

A. 5
B. 8
C. 9
D. 11
E. 15

18. Program pendidikan profesi guru prajabatan diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor ....
A. 78 Tahun 2012
B. 87 Tahun 2012
C. 78 Tahun 2013
D. 87 Tahun 2013
E. 92 Tahun 2013

19. Di bawah ini merupakan bentuk-bentuk pendidikan menengah, kecuali ....
A. MTs
B. SMA
C. SMK
D. MA
E. MAK

20. Batas minimal peserta program wajib belajar berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah ....
A. 5 tahun
B. 6 tahun
C. 7 tahun
D. 8 tahun
E. Tidak ada jawaban benar

21. Lembaga mandiri yang dibentuk untuk berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan, dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan adalah ....
A. Dewan Pendidikan
B. KKG
C. Komite Sekolah
D. OSIS
E. Tidak ada jawaban yang benar

22. Mata pelajaran antropologi merupakan salah satu mata pelajaran karakteristik penjurusan yang diujikan dalam Ujian Nasional tingkat SMA untuk jurusan ....
A. Bahasa
B. IPA
C. IPS
D. Agama
E. Tidak ada jawaban benar

23. Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memerhatikan hal-hal di bawah ini, kecuali ....
A. Peningkatan akhlak mulia
B. Peningkatan kualitas tempat belajar
C. Dinamika perkembangan global
D. Peningkatan potensi peserta didik
E. Tuntutan dunia kerja

24. Adi Vidyalaya adalah program pendidikan yang setara dengan ....
    A. SD
    B. SMP
    C. SMA
    D. Perguruan Tinggi
    E. Tidak ada jawaban benar

25. Sebagai sarana untuk mendukung pengembangan profesi, pemerintah memberikan guru hak cuti studi dengan masa cuti maksimal ....
    A. 3 bulan
    B. 6 bulan
    C. 1 tahun
    D. 2 tahun
    E. 4 tahun

KUNCI JAWABAN DAN PEMBAHASAN SOAL SKB TENAGA PENDIDIK (PENDIDIKAN DASAR & MENENGAH)

1. Jawaban: B
   Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 mengatur tentang guru dan dosen.

2. Jawaban: A
   Guru dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatan sebagai guru karena:
   a. Melanggar sumpah dan janji jabatan
   b. Melanggar perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama
   c. Melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas selama 1 (satu) bulan atau lebih secara terus-menerus.

3. Jawaban: C
   Dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dijelaskan tentang alokasi dana pendidikan, yaitu dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

4. Jawaban: E
   Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal.

5. Jawaban: A
   Syarat-syarat untuk memperoleh izin pendirian satuan pendidikan meliputi:
   - Isi pendidikan
   - Jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan
   - Sarana dan prasarana pendidikan
   - Pembiayaan pendidikan
   - Sistem evaluasi dan sertifikasi
   - Manajemen dan proses pendidikan

6. Jawaban: C
   Pada tahun 2013, Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan peniadaan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional karena membatasi akses hak warga negara untuk mengenyam kualitas pendidikan yang baik.

7. Jawaban: B
   Pascasarjana merupakan salah satu jenjang dari pendidikan formal di Indonesia.

8. Jawaban: A

   Ketentuan besar biaya satuan BOS yang diterima oleh sekolah adalah:

   - SD/SDLB : Rp580.000/siswa per tahun
   - SMP/SMPLB/SMPT/SATAP: Rp 710.000/siswa per tahun

9. Jawaban: A

   Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui tiga jalur, yaitu:

   1) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal, seperti taman kanak-kanak (TK), raudatul athfal (RA), atau bentuk lain yang sederajat.
   2) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal, seperti kelompok bermain (KB), taman penitipan anak (TPA), atau bentuk lain yang sederajat.
   3) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan informal, seperti pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan.

10. Jawaban: E

    Dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 30 ayat (4) dijelaskan bahwa pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, pesantren, pasraman, pabhaja samanera, dan bentuk lain yang sejenis.

11. Jawaban: E

    Dalam Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dijelaskan bahwa lembaga pendidikan asing pada tingkat pendidikan dasar dan menengah wajib memberikan pendidikan agama dan kewarganegaraan bagi peserta didik Warga Negara Indonesia.

12. Jawaban: E

    Organisasi profesi guru mempunyai kewenangan:

    - Menetapkan dan menegakkan kode etik guru
    - Memberikan bantuan hukum kepada guru
    - Memberikan perlindungan profesi guru
    - Melakukan pembinaan dan pengembangan profesi guru
    - Memajukan pendidikan nasional.

13. Jawaban: E

    Pengelolaan satuan pendidikan tinggi dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi, akuntabilitas, jaminan mutu, dan evaluasi yang transparan.

14. Jawaban: D

    Tahapan pelaksanaan pendidikan karakter bangsa melalui PAUDNI adalah:

    - Tahap I : Tahun 2010 – 2014
    - Tahap II : Tahun 2015 – 2019
    - Tahap III : Tahun 2020 – 2024

15. Jawaban: C

    Dalam aturan tentang komponen-komponen yang dapat dibiayai oleh dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tidak disebutkan bahwa pembiayaan transportasi untuk guru yang mengalami masalah biaya transportasi ke sekolah menjadi salah satu komponen yang dapat dibiayai dengan dana BOS.

16. Jawaban: D

    Penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah dilakukan setiap periode tiga bulanan. Namun, untuk sekolah yang secara geografis berada dalam wilayah terpencil, penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah dilakukan setiap semester, yaitu pada awal semester.

17. Jawaban: C

    Lulusan sekolah atau madrasah yang berkualitas menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional akan memiliki sembilan indikator makro, yaitu:

    1. Beriman
    2. Bertakwa
    3. Berilmu
    4. Bertanggung Jawab
    5. Sehat
    6. Cakap
    7. Kreatif
    8. Mandiri
    9. Demokratis

18. Jawaban: D

    Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2013 mengatur tentang program pendidikan profesi guru prajabatan.

19. Jawaban: A

    Pendidikan menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat. Sementara itu, MTs termasuk sebagai salah satu bentuk pendidikan dasar.

20. Jawaban: B

    Isi dari Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu setiap warga negara yang berusia enam tahun dapat mengikuti program wajib belajar.

21. Jawaban: C

    Komite sekolah/madrasah, sebagai lembaga mandiri, dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.

22. Jawaban: A

    Mata pelajaran antropologi adalah mata pelajaran karakteristik penjurusan yang diujikan dalam Ujian Nasional tingkat SMA untuk jurusan bahasa, bersama dengan mata pelajaran sastra Indonesia dan bahasa asing pilihan.

23. Jawaban: B

    Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memerhatikan:

    - Peningkatan iman dan takwa
    - Peningkatan akhlak mulia
    - Peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik
    - Keragaman potensi daerah dan lingkungan
    - Tuntutan pembangunan daerah dan nasional
    - Tuntutan dunia kerja
    - Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni
    - Agama
    - Dinamika perkembangan global
    - Persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan

24. Jawaban: A

    Adi Vidyalaya adalah program pendidikan yang sederajat dengan SD, MI, Paket A, atau Diniyah Dasar.

25. Jawaban: B

    Guru dapat memperoleh cuti studi yang bertujuan untuk pengembangan keprofesian, paling lama 6 (enam) bulan dengan tetap memperoleh hak gaji penuh.

2. TENAGA PENDIDIK (PENDIDIKAN TINGGI)

LATIHAN SOAL SKB TENAGA PENDIDIK (PENDIDIKAN TINGGI)

1. Kurikulum Pendidikan Tinggi wajib memuat mata kuliah yang ada di bawah ini, kecuali ....
   A. Agama
   B. Pancasila
   C. Sejarah NKRI
   D. Kewarganegaraan
   E. Bahasa Indonesia
2. Berdasarkan sistem pendidikan nasional, perguruan tinggi dapat berbentuk seperti di bawah ini, kecuali ....
   A. Politeknik
   B. Institut
   C. Akademi
   D. Universitas
   E. Vokasi
3. Jabatan fungsional tertinggi bagi dosen yang masih mengajar di lingkungan satuan pendidikan tinggi adalah ....
   A. Dosen senior
   B. Rektor
   C. Dekan
   D. Pembantu Dekan
   E. Profesor
4. Sertifikasi pendidik harus dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntabel. Hal ini dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Pasal ....
   A. 9
   B. 10 ayat (2)
   C. 11 ayat (3)
   D. 13 ayat (1)
   E. 13 ayat (2)
5. Untuk dapat menerima sertifikat pendidik, seorang dosen harus memiliki pengalaman kerja sebagai pendidik pada perguruan tinggi sekurang-kurangnya ....
   A. 5 tahun
   B. 4 tahun
   C. 3 tahun

D. 2 tahun
E. 1 tahun

6. Profesor yang berprestasi dapat diperpanjang batas usia pensiunnya sampai dengan usia ... tahun.
   A. 67
   B. 68
   C. 70
   D. 72
   E. 75

7. Pendidikan kepemudaan dan pendidikan pemberdayaan perempuan termasuk dalam bentuk pendidikan ....
   A. Kepemudaan
   B. Informal
   C. Nonformal
   D. Lokal
   E. Layanan khusus

8. Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi diatur melalui Peraturan Menteri ....
   A. Nomor 3 Tahun 2016
   B. Nomor 7 Tahun 2016
   C. Nomor 10 Tahun 2016
   D. Nomor 7 Tahun 2017
   E. Nomor 10 Tahun 2017

9. Bantuan operasional perguruan tinggi negeri dapat dipergunakan untuk hal-hal berikut ini, kecuali ....
   A. Biaya pemeliharaan pengadaaan
   B. Kebutuhan operasional untuk manajemen
   C. Pengadaan dosen tamu
   D. Pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan
   E. Penambahan bahan praktikum atau kuliah

10. Sebuah fakultas dipimpin oleh seorang dekan yang dibantu oleh wakil dekan sebanyak ....
    A. 2 orang
    B. 3 orang
    C. 4 orang
    D. 5 orang
    E. 7 orang

11. Tahapan terakhir penyusunan kerja sama luar negeri Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi adalah ....
    A. Penjajakan
    B. Perundingan
    C. Perumusan naskah
    D. Penandatanganan
    E. Implementasi perjanjian

12. Penyusunan program diklat dilaksanakan berdasarkan rencana strategis pusat dan memuat hal-hal berikut, kecuali ....
    A. Target peserta diklat
    B. Jenis dan jenjang diklat
    C. Kurikulum

D. Silabus
E. Materi diklat

13. Dalam hal masa jabatan pemimpin PTN berakhir dan pemimpin PTN yang baru belum terpilih, Menteri dapat menetapkan perpanjangan masa jabatan pemimpin PTN untuk jangka waktu paling lama ....
A. 3 bulan
B. 6 bulan
C. 12 bulan
D. 18 bulan
E. 24 bulan

14. Salah satu syarat pembukaan Program Studi di Luar Kampus Utama (PSDKU) adalah memiliki dosen paling sedikit sebanyak ... orang.
A. Enam
B. Sepuluh
C. Dua belas
D. Lima belas
E. Dua puluh

15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 mengatur tentang ....
A. Rekognisi Pembelajaran Lampau
B. Pembukaan, Perubahan, dan Penutupan Program Studi di Luar Kampus Utama Perguruan Tinggi
C. Penamaan Program Studi pada Perguruan Tinggi
D. Pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor
E. Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri

16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia yang mengatur tentang dosen adalah ....
A. PP No. 14 Tahun 2005
B. PP No. 51 Tahun 2005
C. PP No. 37 Tahun 2007
D. PP No. 14 Tahun 2009
E. PP No. 37 Tahun 2009

17. Masa berlaku status akreditasi dan peringkat terakreditasi program studi dan/atau perguruan tinggi adalah selama ....
A. 2 tahun
B. 3 tahun
C. 4 tahun
D. 5 tahun
E. 10 tahun

18. Bantuan biaya pendidikan kepada mahasiswa program magister atau program doktor dengan ikatan dinas sebagai calon dosen mencakup hal-hal di bawah ini, kecuali ....
A. Biaya hidup
B. Uang buku
C. Sarana belajar
D. Asuransi kesehatan
E. Uang transportasi

19. Dosen dapat ditempatkan pada jabatan struktural di luar perguruan tinggi setelah bertugas sebagai dosen paling sedikit selama ... tahun.
    A. Lima
    B. Delapan
    C. Sepuluh
    D. Dua belas
    E. Lima belas
20. Seseorang dapat menjadi calon rektor perguruan tinggi negeri apabila berpendidikan paling rendah ....
    A. Diploma
    B. Sarjana
    C. Magister
    D. Doktor
    E. Tidak ada ketentuan khusus
21. Dalam kurun waktu tiga tahun, dosen yang memiliki jabatan akademik lektor kepala harus menghasilkan karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal nasional terakreditasi setidaknya sebanyak ....
    A. Satu karya
    B. Dua karya
    C. Tiga karya
    D. Empat karya
    E. Lima karya
22. Ketua Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan dalam suatu perguruan tinggi bertanggung jawab kepada ....
    A. Rektor
    B. Wakil rektor
    C. Dekan
    D. Kepala bagian
    E. Ketua program studi
23. Uji kompetensi untuk memperoleh sertifikat pendidik bagi dosen dilakukan dalam bentuk ....
    A. Pembuatan karya ilmiah
    B. Tes tertulis
    C. Tes wawancara
    D. Penilaian portofolio
    E. Ujian mengajar
24. Tahap penjaringan bakal calon Pemimpin PTN harus menghasilkan setidaknya ... orang bakal calon.
    A. Tiga
    B. Empat
    C. Lima
    D. Enam
    E. Delapan
25. Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Perencanaan terdiri atas bagian-bagian berikut ini, kecuali ....
    A. Bagian Registrasi dan Kemahasiswaan
    B. Bagian Administrasi Akademik dan Kelulusan
    C. Bagian Perencanaan dan Pelaporan
    D. Kelompok Jabatan Struktural
    E. Kelompok Jabatan Fungsional

KUNCI JAWABAN DAN PEMBAHASAN SOAL SKB TENAGA PENDIDIK (PENDIDIKAN TINGGI)

1. Jawaban: C

   Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 35 ayat (3), kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah berikut:
   - Agama
   - Pancasila
   - Kewarganegaraan
   - Bahasa Indonesia

2. Jawaban: E

   Perguruan tinggi dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, atau universitas. Vokasi adalah salah satu program pendidikan dari perguruan tinggi.

3. Jawaban: E

   Guru besar atau profesor adalah jabatan fungsional tertinggi bagi dosen yang masih mengajar di lingkungan satuan pendidikan tinggi.

4. Jawaban: C

   Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menjelaskan bahwa sertifikasi pendidik dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntabel.

5. Jawaban: D

   Sertifikat pendidik untuk dosen diberikan setelah memenuhi syarat sebagai berikut:
   - Memiliki pengalaman kerja sebagai pendidik pada perguruan tinggi sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.
   - Memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya asisten ahli.
   - Lulus sertifikasi yang dilakukan oleh perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan pada perguruan tinggi yang ditetapkan oleh Pemerintah.

6. Jawaban: C

   Profesor yang berprestasi dapat diperpanjang batas usia pensiunnya sampai tujuh puluh tahun.

7. Jawaban: C

   Pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.

8. Jawaban: E
   Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2017 mengatur tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

9. Jawaban: B
   Bantuan BOPTN tidak boleh dipergunakan untuk:
   a. Belanja modal dalam bentuk investasi fisik berupa gedung dan peralatan skala besar.
   b. Tambahan insentif mengajar untuk pegawai negeri sipil.
   c. Tambahan insentif dan honor untuk pejabat administrasi, pejabat fungsional, dan pejabat pimpinan tinggi yang berstatus pegawai negeri sipil.
   d. Kebutuhan operasional untuk manajemen.

10. Jawaban: B
    Dekan dibantu oleh 3 (tiga) orang wakil dekan, yang terdiri atas:
    a. Wakil Dekan Bidang Akademik
    b. Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Umum
    c. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama

11. Jawaban: D
    Tahapan penyusunan kerja sama luar negeri berdasarkan pedoman kerja sama di Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, antara lain:
    - Penjajakan
    - Perundingan
    - Perumusan naskah
    - Penandatanganan

12. Jawaban: A
    Program Diklat memuat:
    - Jenis dan jenjang Diklat
    - Kurikulum
    - Silabus
    - Materi Diklat

13. Jawaban: C
    Dalam hal masa jabatan pemimpin PTN berakhir dan pemimpin PTN yang baru belum terpilih, menteri dapat menetapkan perpanjangan masa jabatan pemimpin PTN untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.

14. Jawaban: A
    Untuk setiap Program Studi di Luar Kampus Utama (PSDKU), jumlah dosen paling sedikit berjumlah 6 (enam) orang.

15. Jawaban: C
    Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 yang ditetapkan pada 12 Januari

2017 mengatur tentang penamaan program studi pada perguruan tinggi.

16. Jawaban: E

    Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 mengatur tentang dosen.

17. Jawaban: D

    Berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, masa berlaku status akreditasi dan peringkat terakreditasi program studi dan/atau perguruan tinggi adalah 5 (lima) tahun.

18. Jawaban: E

    Bantuan biaya pendidikan kepada mahasiswa program magister atau program doktor dengan ikatan dinas sebagai calon dosen merupakan biaya investasi dari penyelenggara pendidikan tinggi atau satuan pendidikan tinggi. Bantuan biaya pendidikan tersebut mencakup berikut ini:

    - uang kuliah
    - uang buku
    - sarana belajar
    - uang penelitian
    - biaya hidup
    - asuransi kesehatan.

19. Jawaban: B

    Dosen yang diangkat oleh pemerintah dapat ditempatkan pada jabatan struktural di luar perguruan tinggi setelah dosen yang bersangkutan bertugas sebagai dosen paling sedikit selama 8 (delapan) tahun.

20. Jawaban: D

    Untuk dapat menjadi calon pemimpin perguruan tinggi negeri, seseorang harus berpendidikan Doktor (S3) bagi calon rektor atau ketua dan paling rendah Magister (S2) bagi calon direktur.

21. Jawaban: C

    Dalam kurun waktu tiga tahun, dosen yang memiliki jabatan akademik lektor kepala harus menghasilkan:

    - paling sedikit 3 (tiga) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal nasional terakreditasi; atau
    - paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional, paten, atau karya seni monumental atau desain monumental.

22. Jawaban: A

    Lembaga dalam sebuah perguruan tinggi dipimpin oleh ketua yang bertanggung jawab kepada rektor.

23. Jawaban: D

    Uji kompetensi untuk memperoleh sertifikat pendidik bagi dosen dilakukan dalam bentuk penilaian

pengalaman akademik serta profesional dengan menggunakan portofolio dosen.

24. Jawaban: B

    Tahap penjaringan harus menghasilkan paling sedikit 4 (empat) orang bakal calon pemimpin PTN. Apabila tidak menghasilkan paling sedikit 4 (empat) orang bakal calon pemimpin PTN, dilakukan perpanjangan jangka waktu penjaringan.

25. Jawaban: D

    Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Perencanaan terdiri atas:

    - Bagian Registrasi dan Kemahasiswaan
    - Bagian Administrasi Akademik dan Kelulusan
    - Bagian Perencanaan dan Pelaporan
    - Kelompok Jabatan Fungsional

3. TENAGA KESEHATAN

LATIHAN SOAL SKB TENAGA KESEHATAN

1. Berdasarkan cara pengobatannya, pelayanan kesehatan tradisional terbagi menjadi ....
   A. Keterampilan dan ramuan
   B. Ramuan dan resep
   C. Pijat dan energi dalam
   D. Alternatif dan konvensional
   E. Alternatif dan ramuan

2. Dalam pengupayaan kesehatan jiwa seseorang dapat dilakukan tindakan-tindakan di bawah ini, kecuali ....
   A. Preventif
   B. Promotif
   C. Naratif
   D. Kuratif
   E. Rehabilitatif

3. Fasilitas kesehatan yang tidak memerlukan Surat Izin Operasional dalam aktivitasnya adalah ....
   A. Praktik dokter
   B. Klinik pratama
   C. Puskesmas
   D. Rumah sakit
   E. Klinik umum

4. *Bacille Calmette Guerin* adalah imunisasi yang diharapkan dapat mencegah terjadinya penyakit ....
   A. Campak
   B. TBC
   C. Polio
   D. Difteri
   E. Beri-beri

5. Penggunaan sel punca dalam dunia medis dapat dilakukan untuk tujuan ....
   A. Penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan
   B. Reproduksi dan penyembuhan penyakit
   C. Reproduksi dan pemulihan kesehatan
   D. Semua jawaban benar
   E. Tidak ada jawaban benar

6. Menunjang percepatan penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi di Indonesia melalui upaya pemberdayaan masyarakat merupakan tujuan umum dari ....
   A. Penyuluhan KB
   B. Penyuluhan kesehatan reproduksi

C. Posyandu
D. Imunisasi
E. Semua jawaban benar

7. Di bawah ini merupakan sasaran utama dari pos pelayanan terpadu, kecuali ....
A. Anak remaja
B. Bayi
C. Anak balita
D. Ibu hamil
E. Pasangan usia subur

8. Undang-Undang Republik Indonesia yang mengatur tentang kesehatan adalah ....
A. UU Nomor 32 Tahun 2008
B. UU Nomor 34 Tahun 2008
C. UU Nomor 34 Tahun 2009
D. UU Nomor 36 Tahun 2009
E. UU Nomor 12 Tahun 2010

9. Surat tanda registrasi dokter dan surat tanda registrasi dokter gigi diterbitkan oleh ....
A. IDI
B. Kementerian Kesehatan
C. Konsil Kedokteran Indonesia
D. Mahkamah Kedokteran
E. Tidak ada jawaban benar

10. Untuk melindungi masyarakat penerima jasa pelayanan kesehatan dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dari dokter dan dokter gigi, dibentuklah Konsil Kedokteran Indonesia yang bertanggung jawab kepada ....
A. MPR
B. DPR
C. Presiden
D. Menteri Kesehatan
E. IDI

11. Akomodasi ruang perawatan kelas II dalam ketetapan BPJS Kesehatan dapat diperuntukkan bagi ....
A. Peserta PBI Jaminan Kesehatan
B. Peserta Pekerja bukan Penerima Upah
C. Pejabat Negara
D. Pegawai Negeri Sipil Golongan Ruang I
E. Pegawai Negeri Sipil Golongan Ruang III

12. Vaksin yang digunakan untuk mencegah terjadinya penyakit cacar air adalah vaksin ....
A. MMR
B. Varisela
C. PVC
D. DPT
E. HiB

13. Fasilitas kesehatan tingkat pertama yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dapat berupa fasilitas di bawah ini, kecuali ....
A. Puskesmas
B. Rumah sakit umum

C. Praktik dokter
D. Praktik dokter gigi
E. Klinik pratama

14. Hak-hak pasien diatur dalam Undang-Undang Nomor 2009 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal ....
A. 47
B. 51
C. 52
D. 53
E. 56

15. Dalam menjalankan praktiknya, seorang bidan berwenang untuk memberikan pelayanan yang meliputi hal di bawah ini, kecuali ....
A. Pelayanan kesehatan ibu
B. Pelayanan kesehatan anak
C. Pelayanan kesehatan reproduksi perempuan
D. Pelayanan kesehatan manula
E. Pelayanan kesehatan keluarga berencana

16. Dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi memiliki ... divisi yang masing-masing divisi memiliki fungsi, tugas, dan wewenang yang berbeda.
A. Satu
B. Dua
C. Tiga
D. Empat
E. Lima

17. Hewan pembawa yang dapat menyebarkan penyakit leptospirosis adalah ....
A. Anjing
B. Kucing
C. Ayam
D. Babi
E. Tikus

18. Hak bayi untuk mendapatkan air susu ibu eksklusif diatur dalam undang-undang tentang kesehatan pada Pasal ....
A. 126 ayat (3)
B. 128 ayat (1)
C. 128 ayat (2)
D. 128 ayat (3)
E. Tidak ada jawaban benar

19. Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dibayarkan oleh ....
A. Pemerintah pusat
B. Pemerintah daerah
C. Pemilik perusahaan
D. Peserta yang bersangkutan
E. Tidak ada jawaban benar

20. Toksoplasma merupakan salah satu penyakit berbahaya yang disebabkan oleh ....
A. Bakteri
B. Virus
C. Cacing
D. Ektoparasit
E. Protozoa

21. Surat tanda registrasi sementara dapat diberikan kepada dokter warga negara asing yang melakukan kegiatan yang bersifat sementara di Indonesia dan berlaku selama ....
    A. 1 tahun
    B. 2 tahun
    C. 3 tahun
    D. 4 tahun
    E. 5 tahun
22. Peraturan presiden yang memuat tentang jaminan kesehatan dikeluarkan pada tahun ....
    A. 2010
    B. 2011
    C. 2012
    D. 2013
    E. 2014
23. Tersedianya bahan makanan yang mempunyai nilai gizi yang tinggi secara merata dan terjangkau merupakan tanggung jawab dari ....
    A. Pemerintah pusat
    B. Pemerintah Daerah Tingkat I
    C. Pemerintah Daerah Tingkat II
    D. Masyarakat
    E. Semua jawaban benar
24. Pelayanan imunisasi dasar yang ditetapkan oleh BPJS Kesehatan meliputi imunisasi di bawah ini, kecuali ....
    A. BCG
    B. DCR
    C. DPT-HB
    D. Polio
    E. Campak
25. Kegiatan utama dalam pelaksanaan posyandu meliputi pelayanan di bawah ini, kecuali ....
    A. KIA
    B. Donor darah
    C. Imunisasi
    D. KB
    E. Penanggulangan diare

KUNCI JAWABAN DAN PEMBAHASAN SOAL SKB TENAGA KESEHATAN

1. Jawaban: A

   Berdasarkan cara pengobatannya, pelayanan kesehatan tradisional terbagi menjadi:

   - Pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan keterampilan.
   - Pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan ramuan.

2. Jawaban: C

   Upaya kesehatan jiwa terhadap pasien gangguan jiwa dan masalah psikososial terdiri atas:

   - Preventif
   - Promotif
   - Kuratif
   - Rehabilitatif

3. Jawaban: A

   Praktik dokter tidak memerlukan Surat Izin Operasional dalam aktivitasnya, melainkan cukup menggunakan Surat Izin Praktik.

4. Jawaban: B

   Bacille Calmette Guerin merupakan jenis vaksin atau imunisasi yang diberikan pada saat bayi berusia 1 bulan. Imunisasi ini bertujuan untuk mencegah penyakit TBC.

5. Jawaban: A

   Penggunaan sel punca hanya dapat dilakukan untuk tujuan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan, serta dilarang digunakan untuk tujuan reproduksi.

6. Jawaban: C

   Tujuan umum dari posyandu adalah menunjang percepatan penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi di Indonesia melalui upaya pemberdayaan masyarakat.

7. Jawaban: A

   Sasaran utama posyandu meliputi:

   - Bayi
   - Balita
   - Pasangan Usia Subur
   - Ibu hamil, ibu melahirkan, ibu nifas, dan ibu menyusui

8. Jawaban: D

   Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 mengatur tentang kesehatan.

9. Jawaban: C

   Berdasarkan UU No 29 Tahun 2009 tentang Praktik Kedokteran Pasal 29 ayat (2), surat tanda registrasi dokter, dan surat tanda registrasi dokter gigi diterbitkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia.

10. Jawaban: C

    Konsil Kedokteran Indonesia bertanggung jawab kepada Presiden.

11. Jawaban: D

    Sesuai ketetapan BPJS Kesehatan, yang mendapatkan akomodasi ruang perawatan kelas II adalah:

    - Pegawai Negeri Sipil Golongan Ruang I dan II beserta anggota keluarganya.
    - Anggota TNI dan penerima pensiun Anggota TNI yang setara dengan Pegawai Negeri Sipil Golongan Ruang I dan II beserta anggota keluarganya.
    - Anggota Polri dan penerima pensiun Anggota Polri yang setara Pegawai Negeri Sipil golongan ruang I dan II beserta anggota keluarganya.
    - Pegawai Pemerintah Non-Pegawai Negeri yang setara Pegawai Negeri Sipil golongan ruang I dan II beserta anggota keluarganya.
    - Peserta Pekerja Penerima Upah bulanan sampai dengan 2 (dua) kali penghasilan tidak kena pajak dengan status kawin dengan 1 (satu) anak, beserta anggota keluarganya
    - Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta bukan Pekerja dengan iuran.

12. Jawaban: B

    Varisela adalah imunisasi yang diberikan untuk mencegah penyakit cacar air pada anak. Imunisasi ini diberikan pada anak berusia 10–12 tahun.

13. Jawaban: B

    Rumah sakit umum merupakan fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan bukan fasilitas kesehatan tingkat pertama.

14. Jawaban: C

    Hak-hak seorang pasien diatur dengan undang-undang, tepatnya Pasal 52 Undang-Undang Nomor 2009 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

15. Jawaban: D

    Dalam melaksanakan praktiknya, bidan berwenang memberikan pelayanan yang meliputi:

    - Pelayanan kesehatan ibu
    - Pelayanan kesehatan anak
    - Pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana

16. Jawaban: C

    Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi masing-masing terdiri atas 3 (tiga) divisi, yaitu:

    a. Divisi Registrasi
    b. Divisi Standar Pendidikan Profesi
    c. Divisi Pembinaan.

17. Jawaban: E

    Hewan yang merupakan pembawa leptospira adalah tikus.

18. Jawaban: B

    Dalam Pasal 128 ayat (1) UU Nomor 36 Tahun 2009 dijelaskan bahwa, "Setiap bayi berhak mendapatkan air susu ibu eksklusif sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, kecuali atas indikasi medis."

19. Jawaban: D

    Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja dibayar oleh peserta yang bersangkutan.

20. Jawaban: E

    Toksoplasma disebabkan oleh protozoa atau parasit darah.

21. Jawaban: A

    Surat tanda registrasi sementara berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) tahun berikutnya.

22. Jawaban: D

    Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang Jaminan Kesehatan adalah PP Nomor 12 Tahun 2013.

23. Jawaban: E

    Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat bersama-sama menjamin tersedianya bahan makanan yang mempunyai nilai gizi yang tinggi secara merata dan terjangkau.

24. Jawaban: B

    Pelayanan imunisasi dasar sebagaimana ditetapkan oleh BPJS Kesehatan meliputi Baccile Calmett Guerin (BCG), Difteri Pertusis Tetanus dan Hepatitis-B (DPTHB), Polio, dan Campak.

25. Jawaban: B

    Kegiatan utama pelaksanaan posyandu meliputi:

    - Pelayanan KIA (Kesehatan Ibu dan Anak)
    - Pelayanan KB
    - Pelayanan gizi
    - Pelayanan imunisasi
    - Pelayanan pencegahan dan penanggulangan diare

4. BIDANG EKONOMI & KEUANGAN

LATIHAN SOAL SKB BIDANG EKONOMI & KEUANGAN

1. Dana desa yang diberikan pada tahap ketiga adalah sebesar ....
   A. 10%
   B. 20%
   C. 25%
   D. 30%
   E. 40%

2. Seluruh unsur-unsur dalam logo Kementerian Keuangan tergambar dalam ruang segi lima yang menggambarkan ....
   A. Dasar negara Pancasila
   B. Nilai-nilai dan perilaku utama Kementerian Keuangan
   C. Lima kode etik pegawai Kementerian Keuangan
   D. Lima misi Kementerian Keuangan
   E. Visi Kementerian Keuangan

3. Untuk mewujudkan visi menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi Indonesia yang inklusif di abad ke-21, Kementerian Keuangan memiliki misi-misi berikut ini, kecuali ....
   A. Mencapai tingkat kepatuhan pajak, bea dan cukai yang tinggi melalui pelayanan prima dan penegakan hukum yang ketat.
   B. Mengelola neraca keuangan pusat dengan risiko minimum.
   C. Memastikan dana pendapatan didistribusikan secara efisien dan efektif.
   D. Memastikan perimbangan dana pusat dan daerah secara efisien.
   E. Menarik dan mempertahankan talent terbaik di kelasnya dengan menawarkan proposisi nilai pegawai yang kompetitif.

4. Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang penyelenggaraan sistem informasi keuangan daerah ditetapkan pada tahun ....
   A. 2017
   B. 2016
   C. 2014
   D. 2012
   E. 2006

5. Pihak yang berhak menyusun dan menetapkan Indeks Kesulitan Geografis Desa untuk menghitung dana

desa adalah ....

A. Menteri Keuangan
B. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
C. Gubernur
D. Bupati
E. Kepala desa

6. Tata cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan, dan evaluasi dana desa diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan nomor ....
   A. 46 Tahun 2014
   B. 59 Tahun 2019
   C. 49 Tahun 2016
   D. 56 Tahun 2016
   E. 46 Tahun 2017

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 mengatur tentang ....
   A. Standar Akuntansi Pemerintahan
   B. Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan
   C. Dana Desa
   D. Konversi Penyaluran Dana Bagi Hasil
   E. Keterbukaan Informasi Keuangan Daerah

8. Arsitektur SIKD Nasional dan SIKD Daerah meliputi hal-hal berikut ini, kecuali ....
   A. Arsitektur proses bisnis
   B. Arsitektur data
   C. Arsitektur aplikasi
   D. Arsitektur teknologi
   E. Arsitektur target pembangunan

9. Data yang digunakan untuk menghitung besaran penyaluran Dana Bagi Hasil bersumber dari pemerintah daerah atau ....
   A. Kementerian Keuangan
   B. Kementerian Dalam Negeri
   C. Bank Indonesia
   D. Legislatif Daerah
   E. Bupati

10. Apabila dana desa tersisa di RKD tahun anggaran sebelumnya melebihi 30%, tindakan yang diambil oleh bupati adalah ....
    A. Menunda penyaluran dana desa.
    B. Menyalurkan dana desa hanya sebesar 70%.
    C. Hanya menyalurkan dana desa dua tahap terakhir.
    D. Menyalurkan dana desa setelah mendapat keputusan dari Kementerian Keuangan.
    E. Tidak memberikan dana desa pada tahun anggaran tersebut.

11. Standar manajemen proyek Sistem Informasi Keuangan Daerah meliputi hal-hal berikut ini, kecuali ....

A. Inisiasi
B. Perencanaa
C. Pelaksanaan
D. Pemeliharaan
E. Pemantauan

12. Pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan nomor ....
A. 47 Tahun 2016
B. 58 Tahun 2016
C. 50 Tahun 2017
D. 64 Tahun 2017
E. 71 Tahun 2017

13. Pemerintah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berbasis ....
A. Kas
B. Aset
C. Konseptual
D. Pendapatan
E. Akrual

14. Undang-undang yang mengatur tentang perbankan syariah diterbitkan pada tahun ....
A. 2008
B. 2006
C. 2004
D. 2002
E. 1999

15. Untuk menumbuhkembangkan perekonomian rakyat yang berdampak kepada peningkatan perekonomian nasional, pemerintah mengatur Lembaga Keuangan Mikro melalui undang-undang ....
A. Nomor 4 Tahun 2011
B. Nomor 2 Tahun 2012
C. Nomor 1 Tahun 2013
D. Nomor 6 Tahun 2013
E. Nomor 3 Tahun 2014

16. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan bertanggung jawab kepada ....
A. Presiden
B. Menko Perekonomian
C. Menteri Keuangan
D. Inspektur Jenderal
E. DPR

17. Bentuk pertanggungjawaban kinerja Otoritas Jasa Keuangan tertuang dalam bentuk laporan ....
A. Anggaran dan Pelaksanaan
B. Keuangan dan Kegiatan
C. Pengawasan dan Usul
D. Anggaran dan Kegiatan
E. Anggaran dan Pertanggungjawaban

18. Perubahan Unit Usaha Syariah (UUS) menjadi Bank Umum Syariah dapat terjadi setelah mendapatkan izin dari ....
A. DPR
B. Presiden
C. Menko Perekonomian

D. Menteri Keuangan
E. Bank Indonesia

19. Undang-Undang Republik Indonesia yang mengatur tentang perindustrian adalah undang-undang ....
A. Nomor 2 Tahun 2012
B. Nomor 4 Tahun 2012
C. Nomor 2 Tahun 2013
D. Nomor 3 Tahun 2014
E. Nomor 6 Tahun 2014

20. Usaha yang dikategorikan sebagai usaha kecil memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak ....
A. 1 miliar
B. 2,5 miliar
C. 3,5 miliar
D. 4 miliar
E. 5 miliar

21. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 adalah produk hukum yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan ....
A. Ekonomi Mikro
B. Perbankan Syariah
C. Koperasi
D. Usaha Kecil Menengah
E. Rahasia Dagang

22. Segala hal yang berkaitan dengan Otoritas Jasa Keuangan diatur melalui undang-undang ....
A. Nomor 21 Tahun 2011
B. Nomor 37 Tahun 2011
C. Nomor 18 Tahun 2012
D. Nomor 24 Tahun 2013
E. Nomor 13 Tahun 2014

23. Kenaikan nilai mata uang dalam negeri terhadap mata uang asing biasa disebut dengan istilah ....
A. Redenominasi
B. Inflasi
C. Deflasi
D. Devaluasi
E. Revaluasi

24. Penyaluran dana desa dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan sebanyak ... tahap.
A. Satu
B. Dua
C. Tiga
D. Empat
E. Lima

25. Pembakuan data Sistem Informasi Keuangan Daerah bertujuan untuk kemudahan ....
A. Pengumpulan data
B. Komunikasi data
C. Kompilasi data
D. Konsolidasi data
E. Validasi data

KUNCI JAWABAN DAN PEMBAHASAN SOAL SKB BIDANG EKONOMI & KEUANGAN

1. Jawaban: B

   Jumlah besaran penyaluran dana desa tiap tahap adalah, sebagai berikut.
   - Tahap pertama : 40%
   - Tahap kedua : 40%
   - Tahap ketiga : 20%

2. Jawaban: A

   Ruangsegilimadalamlogo Kementerian Keuangan melambangkan dasar negara Pancasila.

3. Jawaban: D

   Untuk mewujudkan visi menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi Indonesia yang inklusif di abad ke-21, Kementerian Keuangan mempunyai 5 (lima) misi, sebagai berikut.
   - Mencapai tingkat kepatuhan pajak, bea dan cukai yang tinggi melalui pelayanan prima dan penegakan hukum yang ketat.
   - Menerapkan kebijakan fiskal yang prudent.
   - Mengelola neraca keuangan pusat dengan risiko minimum.
   - Memastikan dana pendapatan didistribusikan secara efisien dan efektif.
   - Menarik dan mempertahankan talent terbaik di kelasnya dengan menawarkan proposisi nilai pegawai yang kompetitif.

4. Jawaban: B

   Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang penyelenggaraan sistem informasi keuangan daerah adalah Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2016.

5. Jawaban: D

   Bupati/walikota menyusun dan menetapkan Indeks Kesulitan Geografis Desa berdasarkan faktor-faktor berikut ini:
   - Ketersediaan prasarana pelayanan dasar
   - Kondisi infrastruktur
   - Aksesibilitas atau transportasi.

6. Jawaban: C

   Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016.

7. Jawaban: A

   Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

8. Jawaban: E

   Arsitektur SIKD Nasional dan SIKD Daerah meliputi:

   - Arsitektur proses bisnis
   - Arsitektur data
   - Arsitektur aplikasi
   - Arsitektur teknologi

9. Jawaban: C

   Data yang digunakan untuk menghitung besaran penyaluran Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum dalam bentuk Surat Berharga Negara bersumber dari Pemerintah Daerah atau Bank Indonesia.

10. Jawaban: A

    Bupati/walikota menunda penyaluran dana desa apabila terdapat sisa dana desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen).

11. Jawaban: D

    Standar manajemen proyek Sistem Informasi Keuangan Daerah meliputi inisiasi, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian, dan penutupan.

12. Jawaban: C

    Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 Tahun 2017 mengatur tentang pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa.

13. Jawaban: E

    Pemerintah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual.

14. Jawaban: A

    Undang-undang yang mengatur tentang Perbankan Syariah adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008.

15. Jawaban: C

    Undang-Undang yang mengatur tentang Lembaga Keuangan Mikro adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013.

16. Jawaban: A

    Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada presiden.

17. Jawaban: B

    Setiap akhir masa anggaran, Otoritas Jasa Keuangan wajib menyusun dua jenis laporan, yaitu laporan keuangan dan laporan kegiatan.

18. Jawaban: E

    Dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang tentang Perbankan Syariah, UUS dapat menjadi Bank Umum Syariah tersendiri setelah mendapat izin dari Bank Indonesia.

19. Jawaban: D

    Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 mengatur tentang perindustrian.

20. Jawaban: B

    Kriteria usaha kecil, di antaranya:

    - Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
    - Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

21. Jawaban: E

    Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 mengatur tentang rahasia dagang.

22. Jawaban: A

    Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 mengatur tentang Otoritas Jasa Keuangan.

23. Jawaban: E

    Revaluasi adalah kenaikan nilai mata uang dalam negeri terhadap mata uang asing.

24. Jawaban: C

    Penyaluran dana desa dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan:

    - Tahap I pada bulan April sebesar 40% (empat puluh per seratus),
    - Tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh per seratus),
    - Tahap III pada bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh per seratus).

25. Jawaban: B

    Pembakuan data Sistem Informasi Keuangan Daerah meliputi jenis, periodisasi, dan elemen data, yang bertujuan untuk memudahkan komunikasi data.

5. BIDANG SOSIAL

LATIHAN SOAL SKB BIDANG SOSIAL

1. Untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan pemenuhan hak lanjut usia, pemerintah pusat dan pemerintah daerah didorong untuk mengembangkan kawasan ramah lanjut usia yang pedomannya diatur melalui ....
   A. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998
   B. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015
   C. Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2017
   D. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004
   E. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012

2. Salah satu bentuk rehabilitasi sosial sebagai bagian dari penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah ....
   A. Pemberian bantuan usaha
   B. Pelatihan keterampilan
   C. Supervisi dan advokasi sosial
   D. Penguatan kelembagaan
   E. Bantuan dan asistensi sosial

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 mengatur tentang ....
   A. Penanganan Gelandangan dan Pengamen Jalanan
   B. Penanganan Fakir Miskin
   C. Sistem Jaminan Sosial Nasional
   D. Pedoman Program Perlindungan Sosial
   E. Pemberdayaan Masyarakat Miskin

4. Jaminan hari tua diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip ....
   A. Asuransi sosial
   B. Asuransi sosial atau prinsip ekuitas
   C. Asuransi sosial atau tabungan wajib
   D. Asuransi sosial atau tabungan sukarela
   E. Prinsip ekuitas atau tabungan wajib

5. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2017 mengatur tentang ....
   A. Program Keluarga Harapan
   B. Tugas Pembantuan Kepada Dinas Sosial Daerah

C. Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni
D. Mekanisme Penggunaan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin
E. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial

6. Calon penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni harus memenuhi syarat-syarat berikut, kecuali ....
   A. Terdata dalam data terpadu program penanganan fakir miskin.
   B. Belum pernah mendapat Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni.
   C. Memiliki kartu identitas diri atau kartu keluarga.
   D. Mendapat rekomendasi dari desa atau kelurahan setempat.
   E. Memiliki rumah di atas tanah milik sendiri.

7. Untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional, seseorang setidaknya harus berusia ....
   A. 35 tahun
   B. 40 tahun
   C. 45 tahun
   D. 50 tahun
   E. 60 tahun

8. Data fakir miskin yang telah diverifikasi dan divalidasi kemudian ditetapkan oleh ....
   A. Presiden
   B. Wakil presiden
   C. Menteri
   D. Inspektur jenderal
   E. Kepala daerah

9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 adalah produk hukum yang mengatur tentang ....
   A. Kesejahteraan Sosial
   B. Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia
   C. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
   D. Kesejahteraan Lanjut Usia
   E. Kementerian Sosial

10. Perlindungan sosial dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat, agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan ....
    A. Hak dan kewajiban sebagai warga negara
    B. Aturan setempat yang berlaku
    C. Kearifan lokal masyarakat
    D. Norma-norma dasar negara
    E. Kebutuhan dasar minimal

11. Pendataan dan pemutakhiran data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber

Kesejahteraan Sosial (PSKS) dilaksanakan oleh ....

A. Kementerian Sosial
B. Instansi sosial provinsi
C. Instansi sosial kabupaten
D. Pemerintah desa
E. BPS

12. Untuk penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional dibentuk Dewan Jaminan Sosial Nasional yang bertanggung jawab kepada ....
    A. DPR
    B. Presiden
    C. Wakil presiden
    D. Menteri Sosial
    E. Menteri Keuangan

13. Untuk mendorong, mengoordinasi, memfasilitasi, dan menyinergikan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial perlu dibentuk ....
    A. Asosiasi Badan Usaha Penyelenggara Kesehatan Sosial
    B. Tim Pemantau Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha
    C. Badan Pemeriksa Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha
    D. Forum Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha
    E. Tim Koordinasi Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha

14. Pendataan dan pengelolaan data PMKS dan PSKS digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial berikut ini, kecuali ....
    A. Rehabilitasi sosial
    B. Jaminan sosial
    C. Pemberdayaan sosial
    D. Perlindungan sosial
    E. Kemandirian sosial

15. Evaluasi hasil pelaksanaan pengembangan Kawasan Ramah Lanjut Usia harus dilakukan setidaknya ... kali dalam satu tahun.
    A. Satu
    B. Dua
    C. Tiga
    D. Empat
    E. Lima

16. Pertanggungjawaban Dana Dekonsentrasi dari Kementerian Sosial mencakup aspek-aspek manajerial berikut ini, kecuali ....
    A. Perkembangan realisasi penyerapan dana
    B. Pencapaian target keluaran
    C. Catatan atas laporan keuangan
    D. Kendala yang dihadapi
    E. Saran tindak lanjut

17. Pemberian stimulan modal, peralatan usaha, dan tempat usaha merupakan salah satu bentuk dari ....

A. Rehabilitasi sosial
B. Jaminan sosial
C. Bantuan sosial
D. Pemberdayaan sosial
E. Perlindungan sosial

18. Direktur Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat sesuai perannya dalam susunan pengawas forum tanggung jawab badan usaha di tingkat nasional menjabat sebagai ....
A. Pengawas utama
B. Pengawas pembina
C. Pengawas madya
D. Pengawas
E. Anggota

19. PKH Akses adalah program pemberian bantuan sosial dengan pengondisian secara khusus untuk meningkatkan aksesibilitas keluarga miskin dan rentan terhadap layanan sosial dasar yang berada di ....
A. Wilayah perbatasan negara
B. Wilayah pinggirang kota besar
C. Wilayah kumuh perkotaan
D. Wilayah tinggi angka kemiskinan
E. Wilayah sulit dijangkau

20. Pelaksanaan penanganan fakir miskin di tingkat provinsi dikoordinasi oleh ....
A. Menteri
B. Inspektur jenderal
C. Gubernur
D. Ketua DPRD
E. Kepala Instansi Sosial

21. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi hal-hal berikut ini, kecuali ....
A. Rehabilitasi sosial
B. Jaminan sosial
C. Bantuan sosial
D. Pemberdayaan sosial
E. Perlindungan sosial

22. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial menjadi tanggung jawab ....
A. Lembaga Kesejahteraan Sosial
B. Desa
C. Badan usaha
D. Masyarakat
E. Pemerintah dan pemerintah daerah

23. Berikut merupakan bagian dari sumber daya manusia penyelenggaraan penanganan fakir miskin, kecuali ....
A. Tim ahli penanganan masalah sosial
B. Tenaga pendamping
C. Tenaga kesejahteraan sosial
D. Relawan sosial
E. Pekerja sosial profesional

24. Forum Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha dalam melaksanakan fungsinya berdasarkan pada prinsip-prinsip berikut ini, kecuali ....
A. Akuntabel

B. Transparan
C. Demokratis
D. Pembinaan
E. Sukarela

25. Dewan Jaminan Sosial Nasional terdiri atas unsur pemerintah, tokoh dan/ atau ahli yang memahami bidang jaminan sosial, organisasi pemberi kerja, serta organisasi pekerja, yang berjumlah sebanyak ....
A. 15 orang
B. 20 orang
C. 30 orang
D. 35 orang
E. 60 orang

KUNCI JAWABAN DAN PEMBAHASAN SOAL SKB BIDANG SOSIAL

1. Jawaban: C
   Produk hukum yang mengatur tentang pedoman pengembangan kawasan ramah lanjut usia adalah Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2017.

2. Jawaban: E
   Rehabilitasi sosial diberikan dalam bentuk:
   - Motivasi dan diagnosis psikososial
   - Perawatan dan pengasuhan
   - Pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan
   - Bimbingan mental spiritual
   - Bimbingan fisik
   - Bimbingan sosial dan konseling psikososial
   - Pelayanan aksesibilitas
   - Bantuan dan asistensi sosial
   - Bimbingan resosialisasi
   - Bimbingan lanjut
   - Rujukan

3. Jawaban: B
   Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 adalah undang-undang yang mengatur tentang penanganan fakir miskin.

4. Jawaban: C
   Jaminan hari tua diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial atau tabungan wajib.

5. Jawaban: A
   Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2017 adalah produk hukum yang mengatur tentang program keluarga harapan.

6. Jawaban: D
   Calon penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni harus memenuhi syarat, sebagai berikut.
   - Fakir miskin yang terdata dalam data terpadu program penanganan fakir miskin.
   - Belum pernah mendapat Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni.
   - Memiliki kartu identitas diri atau kartu keluarga.
   - Memiliki rumah di atas tanah milik sendiri yang dibuktikan dengan sertifikat, girik, atau surat keterangan kepemilikan dari camat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah.

7. Jawaban: B
   Untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional, seseorang harus berusia sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun dan setinggi-tingginya 60 (enam

puluh) tahun pada saat menjadi anggota.

8. Jawaban: C
   Data fakir miskin yang telah diverifikasi dan divalidasi ditetapkan oleh menteri dan menjadi dasar bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memberikan bantuan dan/atau pemberdayaan.

9. Jawaban: A
   Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 berisi tentang kesejahteraan sosial.

10. Jawaban: E
    Perlindungan sosial dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat, agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

11. Jawaban: C
    Pendataan dan pemutakhiran data PMKS dan PSKS dilaksanakan oleh instansi sosial kabupaten/kota.

12. Jawaban: B
    Dewan Jaminan Sosial Nasional bertanggung jawab kepada presiden.

13. Jawaban: D
    Untuk mendorong, mengoordinasikan, memfasilitasi, dan menyinergikan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, Menteri membentuk suatu Forum Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha.

14. Jawaban: E
    Pendataan dan pengelolaan data PMKS dan PSKS digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang meliputi:
    - Rehabilitasi sosial
    - Jaminan sosial
    - Pemberdayaan sosial
    - Perlindungan sosial
    - Penanggulangan kemiskinan

15. Jawaban: A
    Evaluasi untuk menganalisis dan menilai hasil pelaksanaan pengembangan Kawasan Ramah Lanjut Usia dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

16. Jawaban: C
    Pertanggungjawaban Dana Dekonsentrasi dari Kementerian Sosial mencakup aspek-aspek manajerial berikut ini.
    - Perkembangan realisasi penyerapan dana
    - Pencapaian target keluaran
    - Kendala yang dihadapi
    - Saran tindak lanjut

Catatan atas laporan keuangan termasuk ke dalam aspek akuntabilitas.

17. Jawaban: D

    Pemberdayaan sosial dilakukan dalam bentuk:
    - Diagnosis dan pemberian motivasi
    - Pelatihan keterampilan
    - Pendampingan
    - Pemberian stimulan modal, peralatan usaha, dan tempat usaha
    - Peningkatan akses pemasaran hasil usaha
    - Supervisi dan advokasi sosial
    - Penguatan keserasian sosial
    - Penataan lingkungan
    - Bimbingan lanjut

18. Jawaban: A

    Pengawas utama dalam pengawas forum tanggung jawab badan usaha di tingkat nasional dijabat oleh Direktur Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat.

19. Jawaban: E

    PKH Akses adalah program pemberian bantuan sosial dengan pengondisian secara khusus untuk meningkatkan aksesibilitas keluarga miskin dan rentan terhadap layanan sosial dasar yang berada di wilayah sulit dijangkau.

20. Jawaban: C

    Gubernur mengoordinasikan pelaksanaan penanganan fakir miskin pada tingkat provinsi.

21. Jawaban: C

    Penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi:
    - Rehabilitasi sosial
    - Jaminan sosial
    - Pemberdayaan sosial
    - Perlindungan sosial

22. Jawaban: E

    Penyelenggaraan kesejahteraan sosial menjadi tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah.

23. Jawaban: A

    Sumber daya manusia penyelenggaraan penanganan fakir miskin dilakukan oleh tenaga penanganan fakir miskin yang terdiri atas:
    - Tenaga kesejahteraan sosial
    - Pekerja sosial profesional
    - Relawan sosial
    - Penyuluh sosial
    - Tenaga pendamping

24. Jawaban: D

    Forum Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha dalam melaksanakan fungsinya berdasarkan pada prinsip:
    - Sukarela
    - Demokratis

- Akuntabel
- Transparan
- Sinergi.

25. Jawaban: A

    Dewan Jaminan Sosial Nasional beranggotakan 15 (lima belas) orang, yang terdiri atas unsur pemerintah, tokoh dan/atau ahli yang memahami bidang jaminan sosial, organisasi pemberi kerja, serta organisasi pekerja.

6. BIDANG HUKUM & HAM

LATIHAN SOAL SKB BIDANG HUKUM & HAM

1. Putusan dapat terbagi menjadi beberapa macam tergantung dari sifat, isi, maupun fungsinya. Hal yang bukan termasuk contoh putusan yang bersifat konstitutif adalah ....
   A. Kasus perceraian
   B. Kasus pengampunan
   C. Kasus kepailitan
   D. Kasus pembatalan perjanjian
   E. Penetapan hak perawatan anak oleh ibunya

2. Dalam asas hukum acara perdata dikenal adanya istilah *ius curia novit*. Maksud istilah tersebut adalah ....
   A. Hakim bersifat menunggu
   B. Hakim dianggap tahu hukum
   C. Hakim dibenarkan menjatuhkan hukuman lebih dari yang dituntut
   D. Persidangan terbuka untuk umum
   E. Kedua belah pihak didengar dan diperlakukan sama

3. Persidangan terbuka untuk umum dimaksudkan untuk menjamin objektivitas peradilan serta pertanggungjawaban hakim terhadap masyarakat. Apabila hal tersebut dilanggar, putusannya bersifat ....
   A. Inkrah
   B. Batal demi hukum
   C. Dapat dibatalkan
   D. Mengikat salah satu pihak
   E. Dapat diajukan banding

4. Peradilan harus objektif. Hal yang menjadi jaminan objektivitas peradilan adalah di bawah ini, kecuali ....
   A. Terbukanya persidangan untuk umum
   B. Asas hakim majelis
   C. Asas *verplichte procureurstelling*
   D. Adanya *recusatie*
   E. Adanya *excusatie*

5. Setiap putusan peradilan harus diberikan tulisan "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Konsekuensi jika tidak terdapat tulisan tersebut maka ....
   A. Putusan tersebut dapat dibatalkan.
   B. Putusan tersebut batal demi hukum.

C. Tidak berpengaruh apa-apa.
D. Putusannya tidak dapat dieksekusi.
E. Putusannya kurang mengikat.

6. Pemanggilan harus sah dan patut. Yang bersangkutan harus telah menerima surat panggilan sekurang-kurangnya ....
   A. 1 minggu sebelum sidang
   B. 5 hari sebelum sidang
   C. 3 hari sebelum sidang
   D. 2 hari sebelum sidang
   E. 1 hari sebelum sidang

7. Untuk menjamin hak, dilakukan sita jaminan yang terbagi menjadi beberapa macam. Penyitaan terhadap barang bergerak milik pemohon adalah ....
   A. Sita *revindicatoir*
   B. Sita *maritaal*
   C. Sita *matrimoniaal*
   D. Sita *conservatoir*
   E. *Darden beslag*

8. Dalam sidang perdata, apabila telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut tetapi tergugat tidak hadir maka ....
   A. Dilakukan penundaan sidang
   B. Diputus verzet
   C. Diputus gugur
   D. Dilakukan pemanggilan ulang
   E. Diputus verstek

9. Berikut ini hal-hal yang menjadikan gugatan rekonvensi tidak dapat dilakukan, kecuali ....
   A. Tuntutan tentang besit tidak boleh diajukan dalam tuntutan tentang hak milik.
   B. Apabila dalam konvensi dirinya bertindak sebagai wali maka dalam rekonvensi tidak boleh bertindak selaku pribadi.
   C. Dalam perkara yang berhubungan dengan putusan.
   D. Kedua gugatan (konvensi dan rekonvensi) mempunyai dasar hubungan hukum yang sama.
   E. Apabila pengadilan negeri yang memeriksa konvensi tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa gugat konvensi.

10. Dalam hal waris, suami atau istri tidak menjadi legitimaris. Berikut ini yang bukan termasuk syarat legitimaris adalah ....
    A. Ahli waris tidak menolak.
    B. Harus masih hidup pada waktu pewaris meninggal.
    C. Harus ada hubungan darah.
    D. Ahli waris tidak dinyatakan tidak patut untuk menerima warisan.
    E. Adanya hubungan semenda.

11. Kompetensi pengadilan yang berwenang kaitannya dengan Teori *Locus*

Delicti, salah satunya adalah Teori Instrumen, maksudnya adalah ....

A. Menentukan *locus delicti* berdasarkan kelakuan.
B. Menentukan *locus delicti* berdasarkan akibat.
C. Menentukan *locus delicti* berdasarkan letak alat tersebut bekerja.
D. Menentukan *locus delicti* berdasarkan efisiensi dalam proses pengadilan.
E. Menetukan *locus delicti* berdasarkan penggunaan alat bantu.

12. Pengaturan mengenai sanksi penggelapan dan pembunuhan termasuk dalam penggolongan hukum pidana, yaitu ....
    A. Hukum Pidana Materiil
    B. Hukum Pidana Formil
    C. Hukum Pidana Regional
    D. Hukum Pidana Sipil
    E. Hukum Pidana Kodifikasi

13. Hukum pidana nasional berlaku bagi warga negara di mana pun dia berada, baik di wilayah nasional maupun tidak. Hal ini merupakan salah satu asas berlakunya hukum pidana nasional, yaitu ....
    A. Asas nasional pasif
    B. Asas nasional aktif
    C. Asas universal
    D. Asas teritorial
    E. Asas bilateral

14. Pencurian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Pasal ....
    A. 104
    B. 310
    C. 351
    D. 362
    E. 372

15. Perbuatan melawan hukum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada Pasal ....
    A. 1320
    B. 1313
    C. 1321
    D. 1319
    E. 1365

16. Berikut ini yang termasuk dalam tugas dan kewenangan panitera adalah ....
    A. Menetapkan hari sidang.
    B. Memproses permohonan grasi.
    C. Menandatangani surat penetapan penahanan, perpanjangan penahanan, dan izin penyitaan.
    D. Menerima serta membuat daftar semua perkara dan permohonan grasi yang diterima.
    E. Membagi perkara kepada para hakim atau majelis untuk disidangkan.

17. Dalam sebuah tuntutan, apa saja yang menjadi permohonan dituliskan pada bagian ....
    A. Kepala tuntutan
    B. Pembukaan

C. Posita
D. Petitum
E. Penutup

18. Terdapat beberapa perbedaan antara hukum pidana dengan hukum perdata. Dari segi sikap hakim, pada hukum pidana adalah ....
    A. Hakim bersifat pasif
    B. Hakim bersifat aktif
    C. Hakim sebagai mediator
    D. Hakim lebih banyak mendengar
    E. Hakim lebih menyerahkan kepada penasihat hukum

19. Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat. Yang bukan termasuk empat syarat tersebut adalah ....
    A. Tidak ada paksaan
    B. Suatu hal tertentu
    C. Adanya kata sepakat
    D. Suatu sebab yang halal
    E. Kecakapan

20. Korporasi juga merupakan subjek hukum. Sanksi pidana yang dapat diterima oleh sebuah korporasi adalah sebagai berikut, kecuali ....
    A. Peringatan dan pengawasan
    B. Denda
    C. Ganti rugi
    D. Actio pauliana
    E. Pembubaran

21. Pencurian termasuk dalam delik ....
    A. Formil
    B. Materiil
    C. Formil materiil
    D. Absolut
    E. Relatif

22. Sanksi yang didapatkan pelaku pembantu tindak pidana adalah ....
    A. Pidana pokok
    B. Pidana pokok dikurangi 1/3
    C. Pidana pokok dikurangi 2/3
    D. Pidana pokok dikurangi ½
    E. Pidana pokok dikurangi 1

23. Dalam sebuah delik dapat terjadi terdapat beberapa tokoh yang terlibat di dalamnya. Berikut ini yang bukan termasuk ke dalam unsur penganjur adalah ....
    A. Tidak ikut melakukan eksekusi.
    B. Tidak memenuhi unsur delik karena tidak ikut berbuat atau tidak melakukan delik.
    C. Ada provokasi.
    D. Bertanggung jawab terhadap semua yang dilakukan, walaupun tidak melakukannya.
    E. Niat berasal dari dirinya, tetapi pelaksananya orang lain.

24. Satu orang dapat saja melakukan satu tindakan yang mengakibatkan dua atau lebih pelanggaran hukum pidana. Hal ini disebut ....

A. Perbarengan
B. Penyertaan
C. Turut serta
D. Limitatif
E. Percobaan

25. Jika A pada tanggal 2 Mei mencuri, kemudian enam hari kemudian menganiaya orang, dan lima hari berikutnya membunuh, berdasarkan teori *concursus realis heterogenus*, dia akan mendapatkan ancaman pidana selama ....

A. 5 tahun
B. 2 tahun
C. 8 bulan
D. 9 bulan
E. 20 tahun

KUNCI JAWABAN DAN PEMBAHASAN SOAL SKB BIDANG HUKUM & HAM

1. Jawaban: E

   Putusan konstitutif adalah putusan yang sifatnya menghapuskan keadaan hukum yang ada dan sekaligus menciptakan keadaan hukum yang baru.

2. Jawaban: B

   Salah satu asas acara perdata adalah hakim bersifat menunggu, yaitu hakim menunggu karena jabatannya atas tuntutan yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan. Apabila tuntutan telah masuk, hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili karena alasan *ius curia novit*, yaitu hakim diannggap tahu hukum, atau lebih tepatnya hakim yang memahami hukum acara perdata.

3. Jawaban: B

   Persidangan terbuka untuk umum adalah setiap orang boleh hadir dan mengikuti jalannya persidangan, sebagaimana dijelaskan pada Pasal 19 ayat (1) UU RI No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pada ayat (2) UU tersebut dijelaskan bahwa jika hal tersebut dilanggar, putusannya batal demi hukum.

4. Jawaban: C

   Jaminan objektivitas peradilan, sebagai berikut.
   - Adanya *recusatie* (hak ingkar).
   - Adanya *excusatie* (pengunduran diri).
   - Terbukanya persidangan untuk umum.
   - Asas hakim majelis.
   - Putusan harus disertai alasan-alasan.

5. Jawaban: D

   Fungsi dari kepala putusan, yaitu tulisan "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" adalah untuk memberikan *title executorial.* Konsekuensi jika tidak terdapat kalimat tersebut maka putusannya tidak dapat dieksekusi.

6. Jawaban: C

   Pemanggilan harus dilakukan menurut tata cara yang ditentukan oleh UU, yang dilakukan oleh juru sita dan disampaikan kepada yang bersangkutan di mana dirinya berdomisili. Juru sita membuat acara pemanggilan dan sekurang-kurangnya 3 hari sebelum sidang, yang bersangkutan telah menerima surat panggilan tersebut.

7. Jawaban: A

   Sita jaminan dilakukan terhadap, berikut ini.

   - Barang milik sendiri, meliputi:
     - ✓ Sita *revindicatoir*: penyitaan terhadap barang bergerak milik pemohon.
     - ✓ Sita *maritaal* dan *matrimoniaal*: terdapat pada kasus perceraian yang ditujukan terhadap harta perkawinan, bisa benda tetap maupun bergerak.
   - Barang milik tergugat, yaitu:
     - ✓ Sita *conservatoir*: penyitaan terhadap barang milik debitur, bisa benda bergerak, tetap, dan barang milik debitur yang dipegang pihak ketiga.

8. Jawaban: E

   Jika tergugat tidak hadir padahal telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut maka diputus verstek. Hal ini karena gugatan telah mengorbankan waktu dan biaya yang tidak sedikit, sehingga penggugat harus dihormati.

9. Jawaban: D

   Tujuan dari rekonvensi, sebagai berikut.

   - Apabila kedua gugatan (konvensi dan rekonvensi) mempunyai dasar hubungan hukum yang sama.
   - Menghemat biaya.
   - Untuk mempermudah prosedur.
   - Dapat menghindari terjadinya putusan yang saling bertentangan.

10. Jawaban: E

    Ahli waris yang mendapat perlindungan hukum atau bagian mutlak yang tidak boleh diganggu gugat apabila pewaris membuat suatu wasiat disebut legitimaris. Syarat legitimaris, sebagai berikut.

    - Ahli waris tidak menolak.
    - Harus masih hidup pada waktu pewaris meninggal.
    - Harus ada hubungan darah.
    - Ahli waris tidak dinyatakan tidak patut untuk menerima warisan.

11. Jawaban: C

    Teori *Locus Delicti* terbagi menjadi empat, sebagai berikut.

    - Teori Kelakuan: untuk menentukan *locus delicti* berdasarkan kelakuan.
    - Teori Akibat: untuk menentukan *locis delicti* berdasarkan akibat.
    - Teori Alat atau Instrumen: untuk menentukan *locus delicti* tergantung di mana alat itu bekerja.
    - Teori Pragmatik: dipilih yang paling mudah dan efisien dalam proses pengadilan.

12. Jawaban: A

    Hukum Pidana Materiil mengatur norma tentang perbuatan yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana.

13. Jawaban: B

    Asas berlakunya hukum pidana terbagi menjadi:

    - Asas teritorial: hukum pidana nasional berlaku terhadap pelanggaran hukum pidana yang terjadi dalam wilayah nasional suatu negara.
    - Asas personal atau nasional aktif: hukum pidana nasional berlaku bagi warga negara di mana pun dia berada, baik di wilayah nasional maupun tidak.
    - Asas kepentingan nasional atau nasional pasif: hukum pidana nasional suatu negara berlaku terhadap perbuatan pidana yang terjadi di wilayah negara lain, apabila perbuatan tersebut mengancam negara yang bersangkutan.
    - Asas universal: hukum pidana nasional suatu negara berlaku terhadap perbuatan pidana dalam wilayah internasional.

14. Jawaban: D

    Pasal 362 KUHP berbunyi, "Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah".

15. Jawaban: E

    Pasal 1365 KUH Perdata menjelaskan bahwa tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seseorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

16. Jawaban: D

    Tugas dan kewenangan panitera, sebagai berikut.

    - Menyelenggarakan administrasi perkara.
    - Mengatur tugas wakil panitera, panitera muda, panitera pengganti, dan wakil sekretaris.
    - Membuat akta-akta administrasi perkara.
    - Menerima serta membuat daftar semua perkara dan peromohnan grasi yang diterima.
    - Membuat salinan putusan.

17. Jawaban: D

    Format tuntutan, sebagai berikut.

    - Kepala tuntutan: DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.
    - Pembukaan.
    - Posita: berisi dakwaan analisis yuridis fakta-fakta, saksi, terdakwa, barang bukti, petunjuk, dan urutan pasal.

- Petitum: berisi yang dimohonkan.
- Penutup.

18. Jawaban: B

SUBSTANSI	PERDATA	PIDANA
Pihak	Antara warga negara dengan warga negara	Antara warga negara dengan negara
Mediasi	Ada	Tidak ada
Sumber hukum	KUH Perdata	KUHP, KUHAP, UU lainnya
Sikap hakim	Pasif karena yang dibuktikan masalah formil	Aktif karena yang dibuktikan masalah materiil
Pembuktian	Dikenal sumpah	Sumpah tidak dikenal
Inisiatif perkara	Para pihak	Negara
Biaya	Para pihak	Negara

19. Jawaban: A

    Dijelaskan pada Pasal 1320 KUH Perdata bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat, sebagai berikut.
    - Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
    - Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
    - Suatu hal tertentu.
    - Suatu sebab yang halal.

20. Jawaban: D

    Hukuman badan atau *actio pauliana* dilakukan untuk subjek hukum orang.

21. Jawaban: B

    Teknik perumusan delik terbagi menjadi, sebagai berikut.
    - Formil: letak pelarangannya pada kelakuan.
    - Materiil: letak pelarangannya pada akibat.
    - Formil materiil: letak pelarangannya tidak hanya pada akibat, tetapi juga pada kelakuannya.

    Dalam hal ini, pencurian mengakibatkan hilangnya barang milik seseorang, sehingga termasuk dalam delik materiil.

22. Jawaban: B

    Dalam Pasal 57 ayat (1) KUHP dijelaskan bahwa dalam hal pembantuan, maksimum

pidana pokok terhadap kejahatan dikurangi sepertiga.

23. Jawaban: D

    Unsur-unsur penganjur, sebagai berikut.

    - Tidak ikut melakukan eksekusi.
    - Dibataskan adanya provokasi.
    - Niat bersumber dari penganjur dan dilaksanakan oleh orang lain.
    - Penganjur bertanggung jawab atas anjurannya saja beserta akibatnya.
    - Tidak memenuhi unsur delik karena tidak ikut berbuat atau tidak melakukan delik.

24. Jawaban: A

    Syarat perbarengan (*concursus*), sebagai berikut.

    - Ada dua atau lebih perbuatan pidana yang dilakukan.
    - Perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh 1 orang.
    - Perbuatan tersebut belum ada yang mengadili.
    - Perbuatan tersebut diadili sekaligus.

25. Jawaban: E

    Menurut teori *concursus realis heterogenus*, sanksi pidana diambil dari yang paling berat ancamannya. Dari ketiga delik pada soal, membunuh memiliki ancaman pidana yang paling berat, yaitu diancam paling lama 20 tahun.

7. FORMASI PEMERINTAHAN DAERAH

LATIHAN SOAL SKB
FORMASI PEMERINTAHAN DAERAH

1. Urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota disebut urusan pemerintahan ....
   A. Umum
   B. Khusus
   C. Absolut
   D. Konkruen
   E. Sinkronisasi

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 adalah undang-undang tentang ....
   A. Desa
   B. Pemerintahan Daerah
   C. Tata Kelola Pembangunan Daerah
   D. Dana Bagi Hasil Pemerintah Pusat dan Daerah
   E. Urusan Pemerintahan Absolut

3. Pedoman tata cara pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur oleh pemerintah melalui ....
   A. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2006
   B. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2009
   C. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007
   D. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2008
   E. Keputusan Presiden Nomor 79 Tahun 2005

4. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi pelayanan-pelayanan berikut ini, kecuali ....
   A. Pangan
   B. Sosial
   C. Pendidikan
   D. Perumahan rakyat
   E. Kesehatan

5. Pengawasan atas penyelenggaraan administrasi umum pemerintahan daerah meliputi hal-hal berikut ini, kecuali ....
   A. Kebijakan daerah
   B. Kelembagaan
   C. Pegawai daerah
   D. Kebijakan pinjaman hibah luar negeri
   E. Barang daerah

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 mengatur tentang ....
   A. Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
   B. Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah
   C. Pedoman Penerimaan Hibah Internasional
   D. Koordinasi Penataan Ruang Daerah
   E. Pajak Tanah Daerah

7. Laporan hasil pemeriksaan Pejabat Pengawas Pemerintah Inspektorat Kabupaten/Kota disampaikan kepada bupati/walikota dengan tembusan kepada ....
   A. Gubernur dan BPK Perwakilan
   B. Gubernur dan Inspektorat Provinsi
   C. Menteri dan gubernur
   D. Menteri
   E. Menteri dan BPK

8. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanai dari penerimaan pembiayaan daerah berikut ini, kecuali ....
   A. Pencairan dana cadangan
   B. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya
   C. Pemindahtanganan barang milik daerah
   D. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
   E. Pinjaman daerah

9. Urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan ....
   A. Pemerintah pusat
   B. Pemerintah daerah provinsi
   C. Pemerintah daerah kabupaten
   D. Presiden
   E. Kementerian Dalam Negeri

10. Usulan inovasi daerah yang berasal dari aparatur sipil negara harus memperoleh izin tertulis dari ....
    A. Ketua DPRD
    B. Bupati
    C. Pimpinan perangkat daerah
    D. Rapat paripurna DPRD
    E. Menteri

11. Pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa diatur oleh ....
    A. Peraturan Menteri
    B. Peraturan Gubernur
    C. Peraturan Bupati
    D. Kecamatan
    E. Desa

12. Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah akan diberhentikan apabila tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama ....

A. Tiga bulan
B. Enam bulan
C. Delapan bulan
D. Sepuluh bulan
E. Dua belas bulan

13. Penanganan konflik sosial merupakan urusan pemerintahan ....
A. Umum
B. Khusus
C. Konkruen
D. Absolut
E. Daerah

14. DPRD kabupaten/kota yang beranggotakan lebih dari 35 (tiga puluh lima) orang dapat membentuk komisi sebanyak ....
A. Dua belas komisi
B. Delapan komisi
C. Enam komisi
D. Lima komisi
E. Empat komisi

15. Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum, di provinsi, kabupaten, dan kecamatan dibentuk ....
A. Pemdakora
B. Forkopimja
C. Forkopimda
D. BPD
E. Musrenbang

16. Pemutakhiran hasil pengawasan pejabat pengawas pemerintah dilakukan paling sedikit ... kali dalam setahun.
A. Satu
B. Dua
C. Tiga
D. Empat
E. Enam

17. Informasi pembangunan daerah memuat informasi perencanaan pembangunan daerah yang mencakup hal-hal berikut ini, kecuali ....
A. Kondisi geografis daerah
B. Potensi sumber daya daerah
C. Ekonomi dan keuangan daerah
D. Aspek kesejahteraan masyarakat
E. Aspek keberlanjutan pembangunan

18. Memiliki jumlah penduduk sedikitnya lima ribu jiwa atau seribu kepala keluarga, merupakan syarat pembentukan desa di wilayah ....
A. Sumatra
B. Jawa
C. Bali
D. Sulawesi Selatan
E. Papua

19. Dalam kedudukannya sebagai wakil pemerintah di wilayah provinsi yang bersangkutan, gubernur bertanggung jawab kepada ....
A. Presiden
B. Menteri Dalam Negeri
C. MPR

D. DPR
E. DPRD Tingkat I

20. Pengundangan peraturan daerah dalam lembaran daerah dilakukan oleh ....
A. Bupati
B. Wakil bupati
C. Sekretaris daerah
D. Ketua DPRD
E. Kepala SKPD terkait

21. Orang yang ingin mencalonkan diri sebagai kepala desa harus berpendidikan paling rendah ....
A. SD
B. SMP
C. SMA
D. Diploma
E. Sarjana

22. Tokoh yang dilarang dilibatkan dalam kampanye pemilihan kepala daerah adalah ....
A. Kepala desa
B. Tokoh masyarakat
C. Ketua RT
D. Ketua RW
E. Tidak ada jawaban benar

23. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh pejabat pengawas pemerintah di bawah koordinasi ....
A. Wakil presiden
B. Menteri koordinator
C. Menteri
D. Gubernur
E. Inspektur jenderal

24. Dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dibentuk dewan pertimbangan otonomi daerah yang bertugas memberikan pertimbangan kepada presiden. Dewan pertimbangan otonomi daerah ini diketuai oleh ....
A. Ketua DPR
B. Wakil presiden
C. Menteri Dalam Negeri
D. Gubernur
E. Bupati

25. Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dibentuk dan ditetapkan dengan ....
A. Keputusan Presiden
B. Peraturan Menteri Dalam Negeri
C. Peraturan Daerah
D. Keputusan DPRD
E. Peraturan Gubernur

KUNCI JAWABAN DAN PEMBAHASAN SOAL SKB FORMASI PEMERINTAHAN DAERAH

1. Jawaban: D

   Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota.

2. Jawaban: A

   Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 adalah undang-undang yang mengatur tentang desa.

3. Jawaban: C

   Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 mengatur tentang pedoman tata cara pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

4. Jawaban: A

   Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi:

   - Pendidikan
   - Kesehatan
   - Pekerjaan umum dan penataan ruang
   - Perumahan rakyat dan kawasan permukiman
   - Ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat sosial.

5. Jawaban: D

   Pengawasan atas penyelenggaraan administrasi umum pemerintahan daerah meliputi:

   - Kebijakan daerah
   - Kelembagaan
   - Pegawai daerah
   - Keuangan daerah
   - Barang daerah.

6. Jawaban: B

   Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 adalah undang-undang tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah.

7. Jawaban: A

   Laporan hasil pemeriksaan Pejabat Pengawas Pemerintah Inspektorat Kabupaten/Kota disampaikan kepada bupati/walikota dengan tembusan kepada gubernur dan BPK Perwakilan.

8. Jawaban: C

   Penerimaan pembiayaan daerah bersumber dari:

   - Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya
   - Pencairan dana cadangan
   - Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
   - Pinjaman daerah

- Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

9. Jawaban: D
   Urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan.
10. Jawaban: C
    Inisiatif usulan inovasi daerah yang berasal dari aparatur sipil negara harus memperoleh izin tertulis dari pimpinan perangkat daerah dan menjadi inovasi perangkat daerah.
11. Jawaban: E
    Pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa diatur dan diurus oleh desa.
12. Jawaban: B
    Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan karena:
    - Berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru.
    - Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan.
    - Tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah.
    - Dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah.
    - Tidak melaksanakan kewajiban kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah.
    - Melanggar larangan bagi kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah.
13. Jawaban: A
    Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk dalam urusan pemerintahan umum.
14. Jawaban: E
    DPRD kabupaten/kota yang beranggotakan 20 (dua puluh) sampai dengan 35 (tiga puluh lima) orang dapat membentuk 3 (tiga) komisi, sementara yang beranggotakan lebih dari 35 (tiga puluh lima) orang membentuk 4 (empat) komisi.
15. Jawaban: C
    Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum, dibentuk forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopimda) provinsi, Forkopimda kabupaten/kota, dan Forkopimda kecamatan.
16. Jawaban: B
    Berdasarkan Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun

2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemutakhiran hasil pengawasan pejabat pengawas pemerintah dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.

17. Jawaban: E

    Informasi pembangunan daerah memuat informasi perencanaan pembangunan daerah yang mencakup:
    - Kondisi geografis daerah
    - Demografi
    - Potensi sumber daya daerah
    - Ekonomi dan keuangan daerah
    - Aspek kesejahteraan masyarakat
    - Aspek pelayanan umum
    - Aspek daya saing daerah

18. Jawaban: C

    Syarat jumlah penduduk untuk pembentukan desa, sebagai berikut.
    - Wilayah Jawa paling sedikit 6.000 (enam ribu) jiwa atau 1.200 (seribu dua ratus) kepala keluarga.
    - Wilayah Bali paling sedikit 5.000 (lima ribu) jiwa atau 1.000 (seribu) kepala keluarga.
    - Wilayah Sumatra paling sedikit 4.000 (empat ribu) jiwa atau 800 (delapan ratus) kepala keluarga.
    - Wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara paling sedikit 3.000 (tiga ribu) jiwa atau 600 (enam ratus) kepala keluarga.
    - Wilayah Nusa Tenggara Barat paling sedikit 2.500 (dua ribu lima ratus) jiwa atau 500 (lima ratus) kepala keluarga.
    - Wilayah Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, dan Kalimantan Selatan paling sedikit 2.000 (dua ribu) jiwa atau 400 (empat ratus) kepala keluarga.
    - Wilayah Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Utara paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) jiwa atau 300 (tiga ratus) kepala keluarga.
    - Wilayah Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Maluku Utara paling sedikit 1.000 (seribu) jiwa atau 200 (dua ratus) kepala keluarga.
    - Wilayah Papua dan Papua Barat paling sedikit 500 (lima ratus) jiwa atau 100 (seratus) kepala keluarga.

19. Jawaban: A

    Gubernur yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil pemerintah di wilayah provinsi yang bersangkutan, bertanggung jawab kepada presiden.

20. Jawaban: C

    Pengundangan peraturan daerah dalam lembaran daerah dilakukan oleh sekretaris daerah.

21. Jawaban: B

    Calon kepala desa wajib memenuhi persyaratan berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat.

22. Jawaban: A

    Dalam kampanye pemilihan kepala daerah, dilarang melibatkan:

    - Hakim pada semua peradilan
    - Pejabat BUMN/BUMD
    - Pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri
    - Kepala desa

23. Jawaban: E

    Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh pejabat pengawas pemerintah dan dikoordinasikan oleh inspektur jenderal.

24. Jawaban: B

    Susunan keanggotaan dewan pertimbangan otonomi daerah terdiri atas:

    - Wakil presiden selaku ketua
    - Menteri selaku sekretaris
    - Para menteri terkait sebagai anggota
    - Perwakilan kepala daerah sebagai anggota

25. Jawaban: D

    Badan Kehormatan DPRD dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan DPRD.